

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah kondisi seseorang maupun kelompok tidak mendapatkan akses yang baik atas berbagai sumber seperti pada sosial, politik maupun sumber ekonomi untuk dipergunakan untuk menggapai taraf seseorang untuk dapat hidup dengan layak. Ini bisa termasuk akses terhadap pendidikan yang bagus, layanan kesehatan serta keamanan dan akses terhadap jaringan sosial dan dukungan.

Kemiskinan menjadi masalah rumit yang diakibatkan dari beberapa komponen yang saling terkait, termasuk faktor ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan suatu pendekatan dengan meliputi garis haluan dan tata olah dengan manfaat demi memajukan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, serta memperkuat ketahanan dan keberdayaan masyarakat yang rentan.

Kemiskinan adalah suatu faktor permasalahan luas yang selalu berjalan di beberapa negara-negara di dunia salah satunya Indonesia. Permasalahan ini, menjadi tanggung jawab presiden pada semua rentan waktu sehingga menjadi tantangan terbesar dalam menjalaninya. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjadikan seluruh warganya sejahtera dan terhindar dari kondisi kemiskinan dan kefakiran. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki peran untuk dapat memerikan pelayanan serta pemberdayaan dengan memberikan suatu layanan kepada masyarakat

Menurut (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,) merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak serta sanggup meningkatkan diri, sehingga bisa melakukan tugas sosialnya. Menurut Arifin dan Soesatyo (2020: 41- 42) “memaparkan kesejahteraan adalah sesuatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan warga secara baik, baik kebutuhan material (sandang, pangan, serta papan) ataupun kebutuhan non material(pendidikan, kesehatan, serta tempat tinggal).” (Syafuruddin et al., 2021)

Kesejahteraan sangat erat hubungannya dengan jumlah penduduk miskin. Kata miskin bisa diartikan dengan orang yang tidak mempunyai ataupun mempunyai suatu tetapi tidak tercukupi, ataupun orang yang terbuak diam oleh kefakiran dan bisa pula dimaksud dengan orang yang hina serta lemah. Tidak hanya itu, kata miskin pula bisa diartikan sebagai orang yang tidak mempunyai apa- apa serta sebagian orang pula berpendapat bahwa miskin adalah orang yang tidak mempunyai suatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. (Syafuruddin et al., 2021)

(Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga. Dalam Penanganan fakir miskin pemerintah harus mentaati azas-azas kemanusiaan, keadilan sosial, non diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan.

Semua pemberdayaan dan upaya selalu diarahkan upaya untuk menjadikan masyarakat yang mengalami permasalahan sosial untuk mempunyai daya agar dapat meningkatkan taraf kehidupan dengan menggunakan sumber daya yang ada, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Melalui kegiatan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya melawan faktor-faktor yang menyebabkan

kemiskinan. Pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut harus dilaksanakan dengan adanya keterlibatan penuh masyarakat itu sendiri secara bertahap, terus-menerus, dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan yang terjadi pada naiknya angka kemiskinan adalah pada pangan. Karena pangan merupakan suatu kebutuhan penting bagi manusia yang mana harus dipenuhi setiap saat sehingga menjadi hak sasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional, sehingga manusia bisa dikatakan tidak bisa terlepas dari kebutuhan suatu pangan. penting bagi pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi semua orang. Kebutuhan pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dihindari. Hubungan antara kebutuhan pangan dengan masyarakat sangatlah erat dan kompleks. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat angka penduduk yang besar.

Tabel 1. 1

Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1021.2023

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK INDONESIA
2021	272.682,5 juta
2022	275.773,8 juta
2023	278.696,2 juta

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Tabel 1.2**Jumlah Penduduk Miskin Indonesia per Maret 2021-2023**

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN PER MARET
2021	27,54 juta
2022	26,16 juta
2023	25,90 juta

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Tabel 1.3**Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2021-2023**

KOTA	JUMLAH PENDUDUK		
	2021	2022	2023
Kepulauan seribu	27.996	28.262	28.523
Jakarta Selatan	2.232.442	2.234.262	2.235.606
Jakarta Timur	3.051.866	3.066.074	3.079.618
Jakarta Pusat	1.057.465	1.053.482	1.049.314
Jakarta Barat	2.446.687	2.458.707	2.470.054
Jakarta Utara	1.788.981	1.799.220	1.808.985
DKI Jakarta	10.605.437	10.640.007	10.672.100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Tabel 1.4**Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta 2021-2023**

KOTA	PENDUDUK MISKIN (RIBU)		
	2021	2022	2023
Kepulauan seribu	3.86	3.67	3.47
Jakarta Selatan	81.50	81.11	71.90
Jakarta Timur	125.37	126.63	124.22
Jakarta Pusat	45.10	44.72	42.78
Jakarta Barat	113.37	112.18	109.49
Jakarta Utara	132.73	133.73	125.98
DKI Jakarta	501.92	502.04	477.83

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Tabel 1.5

Jumlah DTKS Kecamatan di Jakarta Selatan 2021-2023

NO	KECAMATAN	2021	2022	2023
1	Cilandak	92,719	96,001	95,564
2	Jagakarsa	183,484	192,431	190,345
3	Kebayoran Baru	69,978	72,483	71,280
4	Kebayoran Lama	74,826	97,549	105,309
5	Mampang Prapatan	94,148	96,867	93,676
6	Pancoran	93,462	96,963	94,805
7	Pasar Minggu	116,753	132,129	133,056
8	Pesanggrahan	127,055	132,508	132,116
9	Setiabudi	61,494	63,520	62,700
10	Tebet	63,761	88,080	93,060
	Total	977,680	1,068,531	1,071,911

Sumber : Dinas sosial Jakarta Selatan

Tabel 1.6

Jumlah Penerima BPNT di Jakarta Selatan per Kecamatan 2021-2023

NO	KECAMATAN	BPNT 2021	BPNT 2022	BPNT 2023
1	CILANDAK	2541	2533	2,115
2	JAGAKARSA	4007	4920	3,788
3	KEBAYORAN BARU	2198	2355	2,054
4	KEBAYORAN LAMA	3835	4098	3,272
5	MAMPANG PRAPATAN	2928	4014	3,108
6	PANCORAN	3365	4250	3,179
7	PASAR MINGGU	5660	7587	5,516
8	PESANGGRAHAN	4572	4190	3,279
9	SETIABUDI	2426	2902	2,418

10	TEBET	3293	4826	3,907
	TOTAL	34825	41675	32,636

Sumber : Dinas sosial Jakarta Selatan

upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah membentuk berbagai macam program untuk dapat mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok yang salah satu dari programnya adalah Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT). Melalui dibuatnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pemerintah Indonesia membuat program yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT ini dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Sehingga hal ini merupakan salah satu cara pemerintah kepada masyarakat dalam membantu ketersediaan yang cukup bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan. karena kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat besar dan sering didengar oleh beberapa negara yang salah satunya adalah indonesia.

BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. E-warong adalah istilah yang digunakan dalam BPNT untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya (Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, 2018). Dengan adanya e-warung ini ditempatkan dilokasi strategis dan mudah diakses oleh KPM dengan tersebar berbagai daerah sehingga program ini lebih inklusif dan mudah diakses.

Sejak Januari 2021, mekanisme penyaluran bantuan barang lewat e-warung yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah dirubah metode penyalurannya dengan disalurkan langsung melalui Himpunan Milik Negara atau Himbara. Dimana kebijakan ini berdasarkan pada Peraturan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) terkait mekanisme penyaluran dapat dilakukan dengan cara (d) penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial. (Indah Octavia P dan Fia Arista Dewi, 2023)

Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah yang mendapatkannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana masyarakat yang menerima bantuan tersebut menggunakan nilai bantuannya yang langsung dibelanjakan lewat e-warung. Di Kecamatan Pancoran terdapat 3 E-warung yaitu Warung Sejahtera di Rawajati, e-warung di Pengadegan dan e-warung di Duren Tiga. Tetapi pada tahun 2023 e-warung di wilayah kecamatan Pancoran ini sudah tidak aktif lagi dikarenakan program dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah disalurkan langsung ke ATM penerima Manfaat.

Tetapi beberapa hal yang mempengaruhi BPNT tidak kunjung cair. Seperti, bermasalah pada data diri sebagai penerima yang terdapat kesalahan input. Selain itu, terkadang bantuan sosial bisa saja mengalami keterlambatan dalam penyaluran ke setiap KPM. Hal tersebut dapat terjadi karena penyaluran bantuan seperti PKH dan BPNT dilakukan secara bertahap dan tidak serentak di seluruh wilayah di Indonesia. (Pradana, n.d.).

Dalam penyaluran bantuan sosial terdapat adanya permasalahan seperti salah satunya kesalahan dalam pengelolaan data dimana terdapatnya data ganda atau mendapat bantuan ganda. Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari mengungkapkan lebih dari 1,1 juta warga DKI Jakarta yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Premi setelah pihaknya melakukan verifikasi validasi DTKS untuk memastikan kelayakan penerima bansos dan

akuntabilitas anggaran. Dinas Sosial melakukan pemutakhiran DTKS terhadap 5.327.074 warga yang terdaftar DTKS, yaitu perbaikan pada DTKS penetapan Februari 2022 melalui musyawarah kelurahan pada Juni 2022. Dari DTKS Februari 2022 tercatat sebanyak 4.497.724, diketahui tidak layak sebanyak 1.143.639. “Salah satu contoh bentuk cleansing data yang dilakukan adalah penidaklayakan terhadap 25.996 penerima bantuan sosial PKH dan BPNT, serta penerima PBI JKN sebanyak 12.045 hasil padanan ketidaklayakan DTKS Februari 2022. (*Dinsos DKI Jakarta_ 1,1 Juta DTKS Tidak Tepat Sasaran _ BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, 2023*). Terlihat pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6 salahsatu wilayah di Jakarta Selatan yaitu Kecamatan Pancoran dimana pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan dimana Jumlah DTKS kecamatan pancoran pada tahun 2022 sebesar 96,963 menjadi 94,805 pada tahun 2023. Dan jumlah penerima BPNT pada tahun 2022 sebesar 4.250 KPM menjadi 3.179 KPM pada tahun 2023.

Dilihat dari permasalahan tersebut, peneliti berkeinginan meneliti terhadap penerima BPNT di wilayah Kecamatan Pancoran, yang dimana Kecamatan Pancoran ini merupakan salah satu wilayah yang berada pada wilayah Jakarta selatan, dimana Jakarta selatan adalah salah satu wilayah dengan angka kemiskinan cukup tinggi di Jakarta. Dan juga pada wilayah ini terdapat fenomena yang membuat peneliti tertarik karena apakah efektif atau tidaknya program BPNT di wilayah Kecamatan Pancoran karena seperti yang dijelaskan seperti di atas bahwa pada program bantuan sosial yang salah satunya BPNT ini, mengalami ketidaktepatan sasaran dan mengalami keterlambatan. Meskipun tingkat kemiskinan dan jumlah penerima BPNT di Kecamatan Pancoran tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil atau dapat dikatakan dalam keadaan sedang sehingga dapat membuat peneliti ingin meneliti di wilayah tersebut karena dapat memberikan kesempatan pada efektivitas program BPNT dalam konteks yang lebih umum dimana tantangan serta kebutuhan berada ditengah-tengah spektrum kemiskinan sehingga memungkinkan peneliti untuk dapat mengidentifikasi masalah, meningkan efektivitas program, merencanakan kebijakan yang lebih baik, dan memahami dampak program terhadap keluarga yang berada disituasi ekonomi yang tidak stabil.

Berbagai permasalahan ini, ketika tidak diatasi dengan baik, dapat menghambat Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Pemerintah terus melakukan, memperbaiki serta memberikan suatu pelayanan yang baik dan tepat kepada masyarakat dengan mendistribusikan Program bantuan tersebut dan masyarakat pun mendapatkan manfaat dari program tersebut sehingga menjadikan program ini dapat dikatakan berhasil. Melalui latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu “Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitasnya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Masyarakat Miskin pada Kecamatan Pancoran dan untuk memberikan masukan kepada pemerintah apabila ditemukannya faktor penghambat dalam upaya mengefektivisasikan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini, pada penelitian ini dapat berguna untuk dapat memperluas tentang pengetahuan dan juga dapat menjadi suatu

wawasan bagi pemikiran bagi pembaca terkait Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis, pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan memberikan suatu rekomendasi yang bermanfaat dalam upaya masukan kepada Pemerintah dalam menghadapi berbagai macam faktor yang dapat menghambat dalam Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, dapat digunakan untuk memberikan kemudahan dalam melihat dan mengetahui tentang pembahasan perihal penelitian yang terdapat dalam proposal secara menyeluruh. Maka, diperlukannya sistematika yang ada sebagai suatu pedoman atau kerangka dalam penulisan penelitian Skripsi. Berikut Sistematika Penulisan Penelitian Proposal yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, merupakan bagian pendahuluan bagi peneliti dalam penulisan yang menjelaskan hal yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, serta juga terdapat sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, merupakan bagian yang mengenai suatu penjelasan terkait berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh seorang peneliti lainnya sebagai rujukan atau memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tidak hanya itu, dalam bab ini

juga menjelaskan terkait dengan penyajian teori yang digunakan terhadap penyusunan kerangka teori penelitian. Sehingga, dalam bab ini terdiri dari tinjauan hasil penelitian atau penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai metode ataupun pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengembangan data dan informasi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari, pendekatan penelitian yang digunakan, penentuan informan dalam mendapatkan data dan informasi, teknik pengumpulan data yang akan digunakan baik secara observasi, pelaksanaan wawancara secara mendalam, dan juga dokumentasi, serta teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan pada penelitian tersebut, dan juga lokasi serta jadwal penelitian akan dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini mencakup, gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian secara mendalam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang didapat dan diuraikan oleh penulis. Kemudian, pada bab ini di bagian akhir juga mencakup Daftar Pustaka, Lampiran Lampiran, Dokumentasi Penelitian dan juga Biodata Penulis.